

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa sekitar 90% pengelolaan sampah di Indonesia masih menggunakan metode *open dumping*, yaitu membuang sampah tanpa pengelolaan yang memadai (Forsepsi, 2024). Selain itu, pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi, dan peningkatan pola konsumsi masyarakat menyebabkan produksi sampah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Bernika dkk, 2024). Peningkatan produksi sampah yang tidak disertai dengan pengelolaan sampah yang baik tentunya akan berdampak buruk terhadap lingkungan masyarakat, karena sampah yang tidak terkelola dengan baik akan mencemari lingkungan, tanah, dan air, serta akan menyebabkan masalah kesehatan karena terpapar zat berbahaya. (Ahda & Ernyasih, 2025)

Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2023 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi timbulan sampah di Indonesia, dimana pada tahun 2019 jumlah timbulan sampah di Indonesia sebanyak 27.618.401 Ton/Tahun, tahun 2020 sebanyak 27.593.066 Ton/Tahun, tahun 2021 sebanyak 28.459.222, tahun 2022 sebanyak 37.667.251 Ton/Tahun, tahun 2023 sebanyak 19.321.897 Ton/Tahun. Walaupun jumlah timbulan sampah di Indonesia mengalami fluktuasi, namun hal tersebut menunjukkan masih tingginya jumlah sampah yang dihasilkan dan dapat dipastikan akan mengalami peningkatan seiring pertambahan penduduk di Indonesia (Ardianyah dkk, 2025). Tingginya timbulan sampah yang terjadi di Indonesia juga terjadi di berbagai Kota Besar di Indonesia, salah satunya adalah Kota Makassar.

Kota Makassar sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia juga menghadapi masalah serius dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa yang mengalami over kapasitas (Riana, dkk. 2025), yang memiliki luas sebesar 16.8 Ha dengan daya tampung sampah yaitu 927,749.76 m³. Namun sejak tahun 2015 sampai sekarang volume sampah di TPA Tamangapa telah melampaui batas maksimum atau overkapasitas, yaitu 946,441,37 m³ (Rusni, 2024). Salah satu penyebab dari peningkatan volume sampah yang masuk di TPA Tamangapa adalah kurang maksimalnya pengelolaan sampah sebelum di antarkan di Tempat Pembuangan Akhir (Rusni, 2024). Sehingga melihat hal tersebut Pemerintah Kota Makassar merespon dengan menerapkan program bank sampah sebagai alternatif pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Reski Ashariani, 2022).

Program bank sampah diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam mengurangi timbulan sampah dengan cara mengubah sampah anorganik menjadi bernilai ekonomis (Febiola, 2021). Selain itu, bank sampah juga bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam memilah sampah mulai dari tingkat rumah tangga (Karman et al., 2025). Sehingga apabila hal tersebut dilakukan dengan baik, maka program Bank Sampah dapat Mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA, yang nantinya dapat mengurangi pencemaran tanah dan air, penghematan lahan TPA, serta pengurangan emisi gas metana dari penumpukan sampah organik (Rinwantin dkk 2025). Selain itu, kegiatan daur ulang yang didukung oleh bank sampah juga dapat berkontribusi pada konservasi sumber daya alam dan efisiensi energi dalam produksi barang baru (Sukmaniar et al., 2023). Namun walaupun secara konseptual program bank sampah memiliki potensi besar dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan, namun dalam praktiknya program bank sampah di Kota Makassar masih belum efektif.

Rendahnya efektivitas program bank sampah di kota makassar dapat dilihat dari data kontribusi bank sampah terhadap pengurangan sampah yang masuk ke TPA Tamangapa hanya sekitar 0,42%, jauh dari target nasional pengurangan sampah sebesar 30% pada tahun 2025 (Rusni, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa program bank sampah di Kota Makassar belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan timbulan sampah di TPA Tamangapa, salah satu penyebabnya adalah rendahnya kontribusi masyarakat dalam program Bank Sampah (Fatmawati et al., 2019).

Penelitian-penelitian sebelumnya juga mengonfirmasi bahwa Kontribusi masyarakat dalam program bank sampah di Kota Makassar masih relatif rendah. Alfasya (2023) menemukan bahwa di Kelurahan Tallo, kontribusi masyarakat yang rendah menjadi penghambat efektivitas bank sampah. Hal tersebut juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanfie, dkk. (2023) yang menyebutkan bahwa kinerja bank sampah di Kecamatan Rappocini tidak maksimal karena keterlibatan masyarakat yang masih rendah.

Berbeda dengan temuan sebelumnya, Bank Sampah Unit Peduli Pasara di Kecamatan Biringkanaya menunjukkan kondisi yang cukup positif. Pada tahun 2022, bank sampah unit peduli pasara mencatat reduksi sampah anorganik sebesar 11.130 kg dan memiliki 90 nasabah aktif dari 110 nasabah terdaftar (Saldy, 2024). Tingginya kontribusi masyarakat di bank sampah unit peduli pasara tentunya tidak lepas dari peran aktor yang terlibat dalam jejaring pengelolaan bank sampah unit peduli pasara. Hal ini sejalan dengan temuan Ismail (2025) yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan

bank sampah sangat dipengaruhi oleh keberadaan jejaring dari berbagai aktor, karena jejaring tersebut berperan dalam memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas pengelola, serta mendorong peningkatan kontribusi masyarakat dalam program bank sampah. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2025 peneliti menemukan bahwa dalam pengelolaan Bank Sampah Unit Peduli Pasara tidak hanya dilakukan oleh satu aktor tunggal saja, namun melibatkan beberapa aktor seperti Bank Sampah Pusat, Pegadaian, Yayasan Peduli Negeri, dan masyarakat sebagai nasabah Bank Sampah.

Sehingga, berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mencari tahu tentang bagaimana *Governance Network* pada bank sampah unit peduli pasara dengan menggunakan pendekatan jaringan sosial atau *social network theory*. Teori tersebut dipilih untuk melihat bagaimana struktur dalam jaringan dan relasi antar aktor pada Bank Sampah di Unit Peduli Pasara Raya dengan berfokus terhadap empat dimensi, yaitu kontak (*contact*), kepercayaan (*trust*), berbagi informasi (*sharing information*) dan pertukaran sumber daya (*resource exchange*).

Penelitian di Bank Sampah Unit Peduli Pasara Kecamatan Biringkanaya telah banyak diteliti sebelumnya, contohnya penelitian yang dilakukan Malolo (2024) yang berjudul Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Melakukan Pemilahan Sampah Studi Kasus: Bank Sampah Peduli Pasara Di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya 2024 menyebutkan bahwa Terdapat pengaruh antara sikap, norma subjektif, kontrol perilaku dan niat Masyarakat terhadap tindakan pemilahan sampah di Bank Sampah Unit Peduli Pasara. Selain itu, penelitian yang juga dilakukan oleh Saldi (2024) yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Sampah Studi Kasus: Bank Sampah Unit Peduli Pasara Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar menyebutkan bahwa Masyarakat memiliki sikap, norma subjektif, kontrol persepsi yang baik terhadap niat dan perilaku menjadi nasabah Bank Sampah Unit Peduli Pasara.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus terhadap faktor faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam memilah sampah serta menjadi nasabah bank sampah. Akan tetapi penelitian sebelumnya belum membahas bagaimana *governance Network* pada program bank sampah unit peduli pasara Kecamatan Biringkanaya. Sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan penelitian yang berjudul ***Governance Network pada program Bank Sampah Unit Peduli Pasara Kecamatan Biringkanaya.***

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kontak (*contact*) antar aktor yang terlibat dalam program Bank Sampah Unit Peduli Pasara?
2. Bagaimana tingkat kepercayaan (*trust*) yang terbangun antar aktor dalam jaringan pengelolaan Bank Sampah Unit Peduli Pasara?
3. Bagaimana proses berbagi informasi (*sharing information*) antar aktor dalam jaringan pengelolaan Bank Sampah Unit Peduli Pasara?
4. Bagaimana bentuk pertukaran sumber daya (*resource exchanges*) antar aktor dalam jaringan pengelolaan Bank Sampah Unit Peduli Pasara?

1.3. Tinjauan Teori

1.3.1. Governance Network

Menurut Klijin dan Koppenjan (2016:22) dalam Rahayu (2023) menyebutkan bahwa Jaringan kepemerintahan atau *governance network* merupakan sebuah hubungan interdependensi atau ketergantungan para aktor yang memiliki kewenangan pada sektor publik, privat, dan sosial yang bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu *governance network* juga didefinisikan sebagai pola hubungan sosial yang kurang lebih stabil antara aktor yang saling bergantung, yang berkumpul di sekitar masalah kebijakan, program kebijakan, dan atau serangkaian sumber daya, dan yang muncul, dipertahankan, dan diubah melalui serangkaian interaksi (Klijin dkk 2025:12). Teori jaringan pemerintahan merupakan teori yang dibangun dari tradisi Ilmu Politik, ilmu organisasi, dan ilmu administrasi publik yang menjelaskan tentang bagaimana ide interdependensi dan jaringan digunakan dalam konsep jaringan pemerintahan.

Dalam *governance network* terdapat aktor yang beragam, baik dari sektor publik, privat, maupun masyarakat sipil. Dimana walaupun aktor-aktor tersebut memiliki wewenangnya masing-masing, namun pada saat yang sama mereka terikat oleh ketergantungan sumber daya (Klijin, dkk 2025:12). Perkembangan *governance network* erat kaitanya dengan pergeseran paradigma dari *government* menuju *governance*. Klijin & Koppenjan menegaskan bahwa pemerintah semakin bergantung pada aktor lain dalam menyelesaikan persoalan publik, ketergantungan ini mengakibatkan interaksi yang lebih sering antara para aktor, sehingga memunculkan jaringan tata kelola (Klijin, dkk 2025:5).

Governance Network diartikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan, dimana proses pengaturan yang tidak lagi sepenuhnya di kontrol oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai aktor, seperti aktor semi publik

dan swasta, dalam proses interaksinya menimbulkan pola koordinasi dan menghasilkan regulasi (Mayntz,1993:10; Rahayu 2023). Ketergantungan pada *Governance network* dalam pembangunan bukanlah hal yang baru. Dibanyak negara dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan adalah merupakan tradisi untuk melibatkan korporate dan mitra social terutama pada level pembuatan kebijakan nasional. Jaringan dalam *Governance Network* dianggap berhasil ketika proses interaksi antar pelaku atau aktor saling beradaptasi dan memunculkan strategi sehingga sampai pada solusi bersama yang dapat memenuhi syarat dari segi permainan-teoritis sebagai situasi win-win solution. solusi tersebut menyiratkan perbaikan untuk semua pihak yang terlibat dibandingkan dengan situasi yang ada sebelumnya (Klijn & Koppenjan, 2016:19 ; Rahayu 2023).

Semakin terkenal riset tentang *governance network* berakar wawasan sentral yang dikembangkan dalam teori organisasi dan teori politik (Klijn 1997; Klijn & Koppenjan 2016:19; Rahayu 2023). Konsep organisasi sebagai sistem terbuka yang beradaptasi pada perubahan lingkungan (Klijn & Koppenjan 2016:19; Rahayu 2023), dan pengakuan bahwa lingkungan ini terdiri dari organisasi lain yang membuka jalan bagi yang baru fokus pada pertukaran informasi dan sumber daya antarorganisasi yang terjadi di dalam melalui bentuk-bentuk interorganisasi yang relatif stabil (Aldrich 1979; Klijn & Koppenjan 2016:19; Rahayu 2023).

Governance network mengartikulasikan sejumlah pribadi, semi publik dan aktor publik yang bergantung satu sama lain dalam hal sumber daya dan kapasitas organisasi. secara operasional mereka tidak diperintahkan oleh atasan berpikir atau bertindak dengan cara tertentu. Untuk menjadi bagian dari jaringan pemerintahan tertentu para aktor harus menunjukkan bahwa mereka memiliki andil dalam masalah kebijakan yang ada di tangan dan bahwa mereka dapat menyumbangkan sumber daya dan kapasitas nilai tertentu terhadap aktor lain. Hubungan interdependensi berarti bahwa aktor jaringan secara horizontal daripada hubungan vertikal. Namun, hubungan horizontal antara para aktor tidak menyiratkan bahwa mereka sama dalam hal otoritas dan sumber daya (Mayntz 1993;Rahayu 2023). alokasi sumber daya material dan nonmaterial di antara aktor jaringan, partisipasi bersifat sukarela dan para aktor bebas meninggalkan jaringan,saling tergantung satu

Governance network merupakan bentuk interaksi antaraktor dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan program, maupun implementasi kebijakan publik. Interaksi tersebut melibatkan berbagai aktor (multiaktor) yang memiliki kepentingan, pengetahuan, serta persepsi yang berbeda-beda terhadap suatu permasalahan. Perbedaan yang muncul dalam interaksi antaraktor inilah yang kemudian menjadi bagian dari kompleksitas dalam pelaksanaan jaringan atau *governance network*. Oleh

karena itu, pendekatan *social network theory* menjadi konsep yang penting untuk memahami kompleksitas yang terjadi dalam jaringan implementasi kebijakan publik.

1.3.1.1 indikator struktur dalam jaringan kebijakan publik

Struktur dalam jaringan kebijakan dimaksudkan untuk melihat posisi aktor dalam pelaksanaan jaringan kebijakan. Menjelaskan tentang pola hubungan yang di lihat dari posisi masing masing aktor dalam bekerja dan berinteraksi. Sedangkan relasi dimaksudkan untuk melihat hubungan relasional masing masing aktor yang terlibat, bekerja dan berinteraksi dalam proses jaringan kebijakan publik. Dalam teori jaringan sosial, struktur sistem sosial dikonseptualisasikan dan diukur sebagai pola hubungan antar aktor (Klijn & Koppenjan 2016:24 ; Rahayu 2023). Pola-pola ini, yang tidak hanya mencirikan jaringan tetapi juga mempengaruhi cara mereka bekerja dan berinteraksi, sehingga dengan pola hubungan ini dapat melihat struktur dan relais antar aktor dalam jaringan. Pola ikatan pada prinsipnya dapat menjadi karakteristik dari struktur dan relasi dalam jaringan adalah seperti (jumlah) kontak, kepercayaan, berbagi informasi, pertukaran sumber daya, dan sebagainya.

1. Kontak (*contact*)

Dalam jaringan kebijakan frekuensi kontak merupakan yang paling banyak digunakan untuk melihat struktur dalam jaringan kebijakan. Ini, bisa terlihat dari jumlah kontak atau hubungan antar aktor dalam jaringan kebijakan. Frekuensi kontak dapat terlihat dari kontribusi yang diberikan oleh masing-masing aktor terhadap organisasi jaringan dalam proses penyelesaian masalah kebijakan. Kemudian, durasi interaksi antara aktor yang terlibat. Yang terakhir adalah sejauh mana hubungan antara masing-masing aktor dapat memberikan utilitas atau manfaat timbal balik.

2. Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan organisasi jaringan. Sebab tanpa kepercayaan dalam hubungan antar aktor selalu meningkat dan begitu penting hal ini dikarenakan setiap aktor tidak dapat memprediksi segala masalah yang terjadi dalam organisasi jaringan melalui kekuasaan hirarkis, pengawasan langsung, dan detail kontrak. Kepercayaan adalah sebuah harapan dan mempererat hubungan antara aktor, yang tidak terlepas dari aturan bersama dan kesepakatan bersama (Klijn & Koppenjan 2016:115 ; Rahayu 2023). Ada tiga karakteristik yang menjelaskan Trust dalam Jaringan:

- a. Kepercayaan harus didasari oleh kesiapan masing-masing aktor untuk terbuka dalam setiap proses interaksi yang terjadi (Klijn & Koppenjan, 2016:119 ; Rahayu 2023).

- b. Bahwa para aktor harus siap akan risiko yang akan didapatkan dalam proses interaksi yang terjadi (Klijn & Koppenjan 2016:117 ; Rahayu 2023).
- c. Para aktor harus memiliki ekspektasi yang positif terhadap niat atau motif dari aktor-aktor lain (Klijn & Koppenjan, 2016:116). Dengan adanya Trust itu mampu mengurangi ketidakpastian, dan ketidakjelasan dan ambiguitas dalam proses interaksi dari perilaku aktor-aktor yang terlibat (Klijn & Koppenjan,2016:116 ; Rahayu 2023).

dalam proses interaksi para aktor akan lebih banyak melakukan pertukaran informasi sehingga memungkinkan untuk menemukan solusi yang lebih inovatif, serta tingkat kepercayaan yang tinggi akan mewujudkan hasil yang lebih memuaskan dari proses pengambilan keputusan yang kompleks dalam organisasi jaringan. Dimensi kepercayaan (trust) dalam jaringan pemerintahan (Klijn danKopenjan, 2016:24 ; Rahayu 2023) adalah:

- a. Kepercayaan pada perjanjian (agreement trust); pihak yang terlibat dalam organisasi jaringan pada umumnya mengikuti perjanjian yang telah ditetapkan dalam kontrak yang disepakati secara bersama sama.
- b. Manfaat kekuatiran (Benefit of the doubts) pihak dalam organisasi jaringan saling memperingatkan akan kekwatiran ketidakberhasilan program.
- c. Realibilitas (Realibility):adanya kesepakatan dan kebersamaan program dalam pelaksanaan program bersama.
- d. Ketiadaan perilaku oportunistis (the absence of opportunistic behavior); pihak pihak dalam jaringan organisasi tidak ada yang mengambil keuntungan sendiridan merugikan orang aktor lain. Para aktor dalam jaringan melaksanakan program tidak acuh tak acuh.
- e. Kepercayaan pada kemauan baik (goodwill trust); pihak dalam kegiatan ini beranggapan bahwa pada dasarnya kemauan baik pada dari pihak lain bermanfaat untukkeberhasilan program.

3. Berbagi Informasi (*Sharing Information*)

Sharing informasi dalam jaringan dapat diartikan sebagai kesediaan oleh masing-masing aktor untuk memberikan atau menginformasikan informasi-informasi yang dimiliki dan tidak diketahui oleh aktor lain kepada akator lain untuk menyelesaikan masalah. Untuk mencapai tujuan dalam organisasi jaringan, aktor yang terlibat perlu sharing informasi yang rumit tentang sumberdaya, proses, dan permasalahan dalam jaringan. Informasi dibagi secara strategis dan operasional untuk mencapai tujuan bersama sehingga memungkinkan untuk mengambil keputusan yang baik dalam organisasi jaringan. Sharing informasi berperan penting dalam organisasi kolaboratif dan jaringan pemerintahan (Fawcett et al 2007;358-368 ; Rahayu 2023). untuk mencapai startegi sharing informasi yang

efektif, harus melihat 2 aspek yaitu sharing informasi dan koordinasi. Aspek sharing informasi membahas tentang penyediaan basis data bersama untuk tindakan bersama oleh fungsi yang berbeda pada organisasi jaringan. aspek sharing informasi mencakup luas dan kualitas informasi yang di dibagikan kepada aktor dalam organisasi jaringan.

4. Pertukaran Sumberdaya (*Resource Exchanges*)

Setiap aktor yang terlibat didalam jaringan kebijakan memiliki sumber daya masing-masing, akan tetapi selalu saja ada kekurangan atau keterbatasan, dan ketidak cukupan sumber daya yang dimiliki sehingga dalam konsep jaringan kebijakan para aktor tidak dapat mencapai tujuan tanpa menggunakan sumber-sumber daya dari aktor lain. Sumber-sumber daya yang dimaksud dapat berupa skill, informasi dan financial. Adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor menyebabkan ketergantungan aktor. Ketergantungan sumber daya terjadi ketika satu aktor (individu/organisasi) menginginkan atau membutuhkan sesuatu (resource) yang dikontrol oleh aktor lain. Selanjutnya, pertukaran sumber daya mensyaratkan bahwa hanya resource relevan yang dapat dipertukarkan. Kondisi ini harus mengaharuskan adanya mekanisme pertukaran sumber daya antara aktor dalam jaringan kebijakan. Dimensi kontak, kepercayaan, berbagi informasi dan pertukaran sumberdaya dalam jaringan mempengaruhi pola hubungan yang menjadi ciri dari organisasi serta mempengaruhi pola interaksi antara aktor dalam jaringan organisasi.

1.3.2. Sampah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi (KBBI, 2022). Definisi ini diperjelas dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (UU No.18/2008). Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat (Silolongan, dkk. 2019). Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui proses pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir (Siagian, 2022; UU No.18/2008).

Maka dari itu, sampah adalah benda yang sudah tidak digunakan lagi dan dibuang, baik berasal dari aktivitas manusia maupun proses alam. Jika tidak ditangani dengan baik, pah bisa mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. Karena itu, pengelolaannya perlu dilakukan secara teratur dan terus-menerus, mulai dari pengurangan, pengumpulan, pengangkutan,

hingga pengolahan dan pembuangan akhir. Sampah dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan sumber dan sifatnya, yaitu:

- a. **Sampah Organik**
Merupakan sampah yang berasal dari bahan-bahan alami yang dapat terurai secara hayati (biodegradable), seperti sisa makanan, daun-daunan, limbah kebun, serta limbah pertanian.
- b. **Sampah Anorganik**
Terdiri atas bahan-bahan yang tidak mudah terurai oleh proses alami, seperti plastik, logam, kaca, dan beberapa jenis kertas. Sampah jenis ini umumnya membutuhkan waktu lama untuk terurai di lingkungan.
- c. **Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**
Jenis sampah ini mengandung zat kimia berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia maupun lingkungan, seperti limbah medis, baterai bekas, pestisida, dan limbah dari proses industri kimia.
- d. **Sampah Domestik**
Dihasilkan dari aktivitas sehari-hari rumah tangga, yang biasanya terdiri atas campuran sampah organik dan anorganik, termasuk sisa makanan, kemasan, dan barang rumah tangga yang sudah tidak terpakai.
- e. **Sampah Industri**
Berasal dari proses produksi di sektor industri, termasuk limbah padat dari pabrik, sisa bahan baku, maupun produk cacat. Sampah ini bisa bersifat organik, anorganik, atau bahkan termasuk dalam kategori B3 tergantung jenis industrinya.

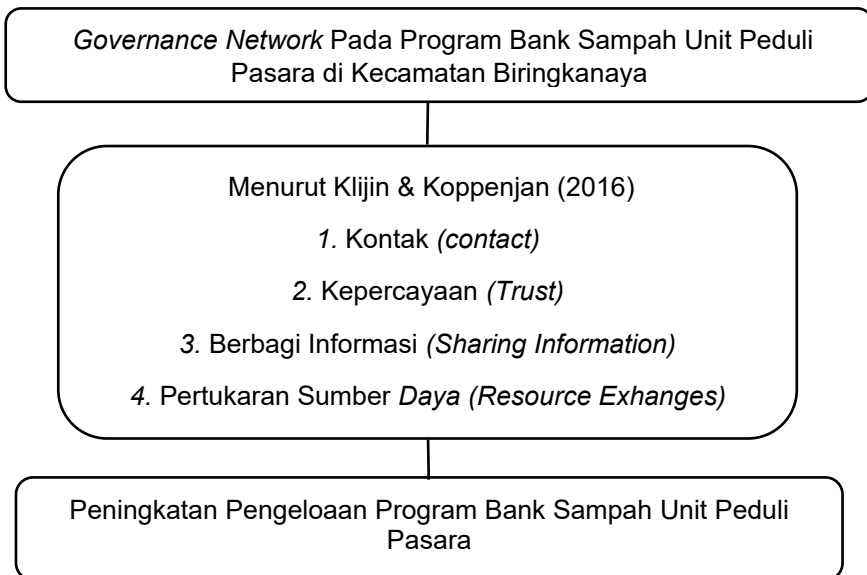
1.3.3. Bank Sampah

Bambang Suwerda ialah seorang warga Yogyakarta yang menjadi pelopor program Bank Sampah. Sebagai warga yang prihatin dengan keadaan sampah di lingkungannya, Bambang Suwerda memulai kegiatan ini sejak 2006 dan mengajak masyarakat peduli lingkungan dan mengolah sampah seperti uang di bank konvensional. Kemudian Konsep tersebut di adopsi menjadi program nasional pada tahun 2012 dengan disahkannya peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanan Reduce, Re-use, dan Recycle Melalui Bank Sampah.

Bank sampah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 04 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. Bank Sampah diciptakan berangkat dari keprihatinan masyarakat terhadap kondisi lingkungan hidup yang semakin memburuk karena dipenuhi oleh berbagai jenis sampah. Oleh karena itu, tujuan Bank Sampah yaitu membantu

menangani pengolahan sampah dan menanamkan kebiasaan baik kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah serta dapat mengelola sampah, memaksimalkan pemilahan sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan, membantu masyarakat memahami nilai barang bekas layaknya sampah, serta mengurangi jumlah sampah yang dibuang dan berakhir menjadi timbunan tidak berguna. Dengan keberadaan Bank Sampah dapat bermanfaat untuk terciptanya lingkungan yang sehat, rapih dan bersih karena kurangnya jumlah sampah di lingkungan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat pun dapat merasakan keuntungan dengan tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat, selain itu juga menambah penghasilan masyarakat.

1.3.4. Kerangka Penelitian



Gambar 1.1 Kerangka penelitian

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk kontak (*contact*) antar aktor yang terlibat dalam program Bank Sampah Unit Peduli Pasara.
2. Untuk Mengetahui tingkat kepercayaan (*trust*) yang terbangun antar aktor dalam jaringan pengelolaan Bank Sampah Unit Peduli Pasara.
3. Untuk mengetahui proses berbagi informasi (*sharing information*) antar aktor dalam jaringan pengelolaan Bank Sampah Unit Peduli Pasara
4. Untuk mengetahui bentuk pertukaran sumber daya (*resource exchanges*) antar aktor dalam jaringan pengelolaan Bank Sampah Unit Peduli Pasara.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak lain yang berkepentingan dalam penelitian ini, adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang relevan dan sebagai sumber informasi bagi siapa pun yang ingin mengetahui jejaring antar organisasi yang terjalin di Bank Sampah Unit Peduli Pasara Raya

2. Praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan sebagai bahan pertimbangan bagi Bank Sampah Unit di Kota Makassar serta para aktor yang berperan dalam program Bank Sampah di Unit Peduli Pasara Raya

BAB II METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah memahami secara mendalam bagaimana proses tata kelola jaringan (*Governance Network*) pada Bank Sampah Unit Peduli Pasara di Kecamatan Biringkanaya. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Creswell tentang penelitian Kualitatif, dimana menurut Creswell dalam Judijanto, dkk. (2024) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap penting oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Fokus utamanya adalah memperoleh gambaran holistik yang kontekstual, melalui proses pengumpulan data yang bersifat alami, interaktif, dan reflektif.

2.1.1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada jejaring antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah di unit peduli pasara Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah teori *Governance Network* yang dikemukakan oleh Kijin & Koppenjan (2016). Sehingga fokus dari penelitian ini adalah:

1. Kontak (*Contact*), untuk melihat kontribusi yang diberikan oleh masing-masing aktor yang terlibat serta durasi interaksi antar aktor dalam pengelolaan bank sampah unit peduli pasara
2. Kepercayaan (*Trust*), untuk melihat bagaimana kepercayaan terbangun antar aktor yang terlibat dalam jaringan pengelolaan bank sampah unit peduli pasara
3. Berbagi Informasi (*Sharing Information*), untuk melihat informasi yang di berikan oleh masing-masing aktor yang terlibat dalam jaringan pengelolaan bank sampah unit peduli pasara da
4. Pertukaran Sumber Daya (*Resource Exchanges*), untuk melihat bagaimana bentuk ketergantungan antar aktor yang terlibat dalam jaringan pengelolaan bank sampah unit peduli pasara

2.2. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi secara rinci terhadap suatu fenomena dalam batasan konteks yang nyata. Creswell (2018) menjelaskan bahwa studi kasus digunakan ketika peneliti ingin menggali fenomena spesifik yang memiliki batas ruang dan waktu tertentu. Oleh karena itu, Bank Sampah Unit Peduli Pasara dipilih sebagai *bounded system* yang diteliti, sehingga penelitian ini dapat memberikan deskripsi komprehensif mengenai bentuk jaringan tata kelola yang terbentuk di dalamnya.

2.3. Prosedur Penelitian

2.3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Bank Sampah Unit Peduli Pasara, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa unit tersebut menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang relatif tinggi dan menjadi salah satu bank sampah dengan capaian reduksi sampah terbesar di wilayahnya.

2.3.2. Penentuan Informan

Informan penelitian ditentukan secara purposive, yaitu dipilih secara sengaja sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Creswell (2018), purposive sampling merupakan teknik penentuan partisipan yang dianggap paling memahami fenomena yang diteliti. Informan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang dianggap sebagai pihak paling yang mengetahui dan memahami permasalahan serta jejaring dalam penelitian ini. Sehingga yang menjadi informan dalam penelitian *Governance Network* pada Bank Sampah Unit Peduli Pasara Kecamatan Biringkanaya, yaitu:

1. Kepala tata usaha bank sampah Pusat
2. Manager Bank Sampah Unit Peduli Pasara Raya
3. Ketua Yayasan Peduli Negeri (YPN) Makassar
4. Petugas Agen Pegadaian (PAP)
5. Nasabah Bank Sampah Unit Peduli Pasara Raya

2.3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu:

1. Observasi
Observasi dilakukan pada aktivitas operasional bank sampah, seperti kegiatan penyetoran sampah, interaksi antara pengurus dan nasabah, serta bentuk koordinasi dengan pihak luar. Menurut Creswell (2018), observasi membantu peneliti memahami perilaku dan situasi secara langsung dalam konteks alami.
2. Wawancara Mendalam
Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, pandangan, dan peran para aktor dalam jaringan tata kelola bank sampah. Wawancara memungkinkan peneliti menggali makna yang diberikan informan terhadap fenomena yang diteliti.
3. Dokumentasi
Telaah dokumen meliputi laporan kegiatan, catatan administrasi bank sampah, notulen rapat, maupun kebijakan pemerintah yang terkait. Teknik ini digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data hasil wawancara dan observasi

2.3.4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah diperoleh akan menggunakan empat tahapan ialah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan di lapangan. Dalam reduksi data peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi oleh peneliti.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraiansingkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya. Dalam penyajian data peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun dengan memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi dan kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti pada suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau melihat salinan suatu temuan yang disimpan dalam perangkat data yang lain.

2.3.5. Validitas dan Realibilitas Data

1. Validitas Data

Validitas data yang dimaksud yaitu alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman wawancara yang dibuat sesuai dengan pandangan Sutrisno dalam mengukur efektivitas dari suatu program sehingga penilaian atas keberhasilan efektivitas program tertuju dan sesuai dengan indikator keberhasilan pada penelitian ini.

2. Realibilitas Data

Realibilitas data yang dimaksud ialah konsistensi dari instrumen pengukuran. Dalam hal ini, peneliti mencocokkan data melalui hasil wawancara mendalam bersama para informan serta pengecekan hasil wawancara melalui informan yang berbeda dengan menemukan hasil wawancara yang sesuai, sehingga ditemukan hasil serta data wawancara yang akurat dan konsisten